

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uni Eropa merupakan organisasi regionalisme di kawasan Eropa dan merupakan regionalisme termapan di dunia. Organisasi ini didirikan dengan tujuan awal ekonomi dengan nama *European Coal & Steel Community* (ECSC), kemudian memperbesar lingkungnya ke berbagai sektor ekonomi serta menciptakan sebuah *common market* menjadi *European Economic Community* (EEC) (EU, n.d.). Regionalisme ini berlanjut mengintegrasikan berbagai sektor, terutama sektor politik sehingga menjadi *European Union/Uni Eropa* (EU/UE). Salah satu sektor politik yang semakin terintegrasi adalah sektor pembuatan kebijakan luar negeri.

Negara-negara anggota mengintegrasikan kebijakan mereka melalui UE dalam menghadapi dinamika global. Pengintegrasian kebijakan luar negeri ini diberi wadah dengan perjanjian. Perjanjian ini melahirkan *European Union Common Foreign and Security Policy* (CFSP) pada tahun 1993 yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, memperkuat keamanan internasional, mempromosikan kerja sama internasional, mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi, menegakkan aturan hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia dan fundamental kebebasan (Malovec, 2022). Kemudian berkembang lebih lanjut dengan hadirnya *European External Action Service* (EEAS) serta *Common Security and Defence Policy* (CSDP).

Malovec (2022) menyebutkan, pada 2015 UE membentuk sebuah strategi global yang disebut *EU Global Strategy on Foreign and Security Policy* (EUGS) untuk mengatasi tantangan global masa depan melalui kerangka kerja strategis. EUGS memiliki lima prioritas dalam menentukan kebijakan luar negeri, yaitu keamanan UE, ketahanan negara anggota dan masyarakat utamanya wilayah timur dan selatan, pendekatan terintegrasi dalam menghadapi konflik, dan tata kelola global di abad 21. Dari hal ini dapat diketahui bahwa UE memiliki kebijakan luar negeri yang masih mengutamakan kawasan di sekitar Eropa maupun transatlantik. Selain itu, dalam satu dekade terakhir, UE menghadapi berbagai perubahan maupun krisis, seperti *euro crisis*, menguatnya populisme di antara negara-negara Eropa, perang Rusia-Ukraina, krisis imigran, keluarnya Inggris dari keanggotaan UE, aksi terorisme 2015-2017 di Eropa maupun perubahan pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengubah situasi geopolitik dan menyebabkan rivalitas kekuatan besar dunia yaitu Amerika Serikat (AS) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sejak era kepemimpinan Donald Trump (Håkansson, 2022).

Håkansson turut berargumen bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar bagi UE. Pandemi membuat negara anggota semakin memperkuat integrasi ekonomi dan persamaan persepsi agar UE memperkuat kebijakan luar negerinya. Håkansson mengutip Fjäder, sektor ekonomi juga menjadi perhatian bagi UE, hal tersebut dikarenakan perdagangan bebas serta *global governance* merupakan nilai-nilai yang didorong dan diprakarsai oleh UE terancam oleh menguatnya rezim perdagangan bebas berdasarkan regulasi serta eksploitasi

ketergantungan ekonomi yang diakibatkan pandemi Covid-19. Rieker dan Riddervold (2021) dalam Håkansson, juga menyebutkan bahwa UE saat ini mengalami pergeseran ke arah pembuatan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan.

Dimulainya pergeseran fokus kebijakan luar negeri UE ditunjukkan melalui beberapa penelitian. Melnikova Yu. Yu dalam artikel jurnal “*EU Strategy in the Indo-Pacific Region: Domestic Drivers and the Chinese Factor*” dijelaskan bahwa kebijakan luar negeri UE mulai bergeser ke kawasan Indo-Pasifik sejak kebijakan *Global Strategy of 2016* yang menekankan keharusan UE untuk meningkatkan perannya di kawasan lain dengan membawa nilai-nilai yang dimiliki oleh Eropa. Kemudian jurnal Felix Heiduk dan Gudrun Wacker dengan judul “*From Asia-Pacific to Indo-Pacific Significance, Implementation and Challenges*” menjelaskan bahwa konsep Indo-Pasifik masih menjadi perdebatan diantara negara-negara maupun institusi supranasional. Sehingga terjadi perdebatan bagaimana UE harus memosisikan diri dalam menginterpretasikan konsep Indo-Pasifik. Selain itu pengaruh dari negara-negara anggota UE (Prancis dan Jerman) yang telah memiliki kebijakan strategi untuk Indo-Pasifik juga perlu diperhatikan.

Jurnal Calle Håkansson “*A geopolitical Europe and its relations with Asia: Assessing the European Union’s Indo-Pacific strategy from the lens of European strategic autonomy*”, membedah kebijakan *EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific* dengan perspektif otonomi strategis Eropa yang dibagi ke dalam tiga dimensi, yaitu *bracing*, *empowering*, dan *engaging*. Dimensi *bracing* melihat

bagaimana UE mengurangi ketergantungan di berbagai bidang (komoditas, teknologi, industri, dll) maupun UE dalam menghadapi tantangan di masa depan, kemudian dimensi *empowering* yang berfokus kepada penggunaan kemampuan dan pengaruh UE dalam menghadapi tantangan global. Terakhir dimensi *engaging* yang melihat bahwa UE harus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengatasi tantangan global sehingga dapat turut membentuk politik global. Prancis sendiri mengadopsi kebijakan *France's Indo-Pacific Strategy* pada 2018 yang kemudian mengampanyekan kepentingan ini ke dalam UE sejak 2020 bersama dengan Jerman yang juga telah merilis kebijakan *Policy Guidelines for the Indo-Pacific* pada 2020 (Ministry for Europe and Foreign Affairs, 2022). Sehingga menyebabkan pergeseran kebijakan UE ke arah Indo-Pasifik, yang kemudian dengan dorongan ini melahirkan kebijakan *EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tentang sejarah hingga terjadinya pergeseran kebijakan luar negeri Uni Eropa. Memberikan gambaran bahwa terjadi perubahan kebijakan luar negeri yang berfokus ke Indo-Pasifik pada tahun 2018-2021 dari yang sebelumnya berfokus pada kawasan Eropa maupun hubungan transatlantik sehingga memunculkan sebuah pertanyaan untuk kemudian dibahas dalam penelitian ini. Pertanyaan tersebut yaitu “Bagaimana proses *decision-making* Uni Eropa dalam membentuk kebijakan *EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific* tahun 2018-2021?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan gelar S1 jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis proses dari dikeluarkannya kebijakan strategi Uni Eropa yang ditujukan untuk kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan ini menarik diteliti karena terdapat dinamika politik (pengaruh) negara-negara anggota UE dalam proses pembentukannya, selain itu kebijakan ini ditujukan untuk kawasan yang cukup jauh dari benua Eropa serta diluar kebiasaan UE yang berfokus pada kawasannya sendiri maupun hubungan transatlantik.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

Untuk menjawab rumusan masalah mengenai alasan Uni Eropa membentuk kebijakan untuk kawasan Indo-Pasifik, penulis menggunakan teori *rational choice institutionalism* untuk menjelaskan alasan kebijakan luar negeri yang memiliki kepentingan ekonomi politik sebuah negara dapat dijadikan dorongan dalam *decision-making* UE. Kemudian kepentingan ekonomi politik ini terefleksikan dalam proses menciptakan strategi kebijakan Indo-Pasifik dari UE.

1.4.1.1 *Rational Choice Institutionalism*

Mark A. Pollack (2003) menyebutkan bahwa teori *rational choice institutionalism* merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai bagaimana aktor memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dalam membentuk institusi politik utamanya dalam pembentukan kebijakan dalam maupun luar negeri. Kemampuan yang dimaksud dalam hal ini dapat dipahami sebagai kebijakan luar negeri yang dimiliki oleh negara. Pollack juga menyebutkan bahwa negara menggunakan kebijakan luar negeri ini dalam usaha untuk mempengaruhi jalannya institusi supranasional utamanya dalam pembentukan suatu kebijakan maupun agenda politik institusi. Dengan dasar kebijakan luar negeri, negara dapat mempengaruhi melalui proses negosiasi kemudian pembentukan koalisi dengan negara yang memiliki kepentingan yang sama maupun menggunakan kekuatan pengaruh mereka agar kepentingan tercapai (Pollack, 2003). Pembentukan aliansi ini dapat terjadi dalam proses *decision-making* yang terjadi dalam UE yang menggunakan mekanisme *consensus-building*.

1.4.1.2 Kepentingan Ekonomi Politik

Dalam ekonomi politik internasional, dapat dipahami bahwa kebijakan ekonomi luar negeri negara merupakan hasil dari pengaruh keadaan global secara keseluruhan (Lake, 2003). Selain itu, tekanan domestik juga turut membentuk kepentingan yang kemudian disalurkan melalui kebijakan ekonomi luar negeri yang dibentuk. Lake (2003) menyebutkan bahwa peneliti sepakat akan pengaruh ekonomi dan politik membentuk kebijakan ekonomi luar negeri. Selain itu geopolitik juga disebutkan mempengaruhi negara utamanya negara lemah yang

dikelilingi oleh negara kuat. Dapat dipahami bahwa, kebijakan ekonomi luar negeri sangat dipengaruhi oleh keadaan internasional serta kepentingan domestik. Kemudian interdependensi ekonomi juga menciptakan masalah keamanan jika tidak diatur dengan baik.

Menurut Robert Gilpin (2001) menyebutkan bahwa negara memiliki kepentingan dalam pembentukan kebijakan ekonomi luar negeri. Hal ini terjadi karena pada dasarnya negara memiliki tugas untuk melindungi kepentingan nasional dan rakyatnya, maka dari itu negara akan selalu berusaha menggunakan *power* yang dimilikinya untuk menggerakkan ekonomi internasional agar berjalan atau mengarah sesuai dengan kepentingan yang dimiliki negara-negara tersebut (Gilpin, 2001). Lebih lanjut, Robert Gilpin juga berargumen bahwa dibentuknya regionalisme sebagai bentuk usaha negara untuk memperkuat pengaruhnya agar negara di sekitarnya atau negara yang memiliki kesamaan pandangan bekerja sama untuk mencapai kepentingan kolektif bersama melalui institusi regionalisme.

Melalui Benjamin J. Cohen (2008) juga dapat disimpulkan bahwa kepentingan ekonomi politik sebuah negara dapat dimanifestasikan ke berbagai kebijakan luar negeri. Kebijakan ini dapat berupa kebijakan perdagangan, investasi, bantuan luar negeri, usaha diplomasi maupun intervensi kekuatan militer. Penggunaan berbagai pendekatan kebijakan ini sendiri berdasarkan dari kondisi yang dihadapi oleh masing-masing negara sehingga manifestasi kebijakan luar negeri yang diambil akan berbeda-beda dalam menghadapi permasalahan atau dalam memenuhi kepentingan mereka.

1.4.1.3 *Decision-Making Uni Eropa (Intergovernmental Decision-Making Regime)*

Menurut Moravcsik (1998) dalam Sergio Fabbrini (2015), menjelaskan bahwa interpretasi dari *intergovernmentalism* yaitu mengenai terjadinya negosiasi besar antara pemerintahan nasional berbagai negara yang dipengaruhi oleh kepentingan sosial. Kemudian dalam Uni Eropa, *intergovernmentalism* melahirkan rezim *decision-making intergovernmental* diwakilkan dengan hadirnya *European Council* dan *Council of the European Union* dari negara anggota yang berisikan individu yang telah ditunjuk oleh masing-masing negara anggota. Individu-individu yang ditunjuk ini menjalankan agenda mereka dalam lembaga ini sesuai dengan petunjuk serta kepentingan dari negara yang mengirimkan mereka ke dalam institusi ini (Sergio Fabbrini, 2020). Karena kebijakan diambil berdasarkan keputusan ini, maka *European Court of Justice* (ECJ) kemudian dikecualikan dan sehingga peran pengawas secara yudisial tidak bisa digunakan.

Sergio Fabbrini (2020) memberi contoh bahwa kebijakan luar negeri maupun keamanan Uni Eropa merupakan kebijakan yang diambil berdasarkan keputusan, inisiatif dalam keputusan ini biasanya diangkat secara spesifik oleh suatu negara ataupun kelompok negara anggota. Akan tetapi mengutip Heipertz dan Verdun (2010: 20) dalam Sergio Fabbrini (2015) mengatakan bahwa dalam sebuah negosiasi antar negara anggota Uni Eropa, negara terbesar akan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam jalannya proses maupun hasil dari negosiasi. Sehingga negara besar ini akan menggunakan pengaruhnya dalam pembuatan

keputusan atau kebijakan. Penggunaan pengaruh oleh negara-negara besar pastinya akan menimbulkan perselisihan atau ketidaksukaan negara kecil pada negara besar. Tetapi menurut Schild (2010: 1380) dan Webber (1999: 16) dalam Sergio Fabbrini (2015) dengan perbedaan yang besar mengenai preferensi atau kepentingan awal negara-negara besar dalam negosiasi, menyebabkan negara kecil cenderung akan menerima keputusan akhir dari negosiasi. Sebagai contoh, dalam penyelesaian *euro crisis* Prancis dan Jerman membentuk aliansi dan menjadi pemimpin dalam usaha penyelesaian permasalahan karena konstelasi politik jangka panjang yang membawa kedua negara menjadi negara yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan Uni Eropa (Fabbrini, 2015). Berdasarkan penjelasan itu, dapat disimpulkan bahwa dalam proses *decision-making* terdapat persaingan pengaruh antar negara.

1.4.1.4 Consensus-building Decision-Making

Dalam menentukan negara besar atau pun negara kecil, dapat dilihat dari bobot voting yang telah ditetapkan dalam *European Council* (Widgrén, 1996). Pengambilan keputusan dalam *European Council* menggunakan mekanisme *consensus-building* yang berlanjut pada *Qualified Majority Voting* (QMV) yang berbasis sistem *weighted voting* sehingga dengan kepemilikan porsi suara yang lebih besar dapat mempengaruhi negara lain yang memiliki porsi suara yang lebih kecil (Zulkarnaen, 2021). Perlu diketahui bahwa QMV akan diberlakukan jika *consensus* tidak tercapai. Kemudian untuk mencapai *consensus* dalam *European Council*, negara-negara saling mempengaruhi karena untuk mencapai keputusan, negara anggota *European Council* membutuhkan koordinasi satu dengan lainnya

yang bersifat sukarela. Navid Sabet (2015) juga menyebutkan bahwa kesepakatan dapat tercapai akibat faktor kultur, norma, hubungan baik maupun perhitungan matang negara agar kepentingannya turut masuk dalam keputusan yang dihasilkan. Selain itu, negara merupakan aktor rasional yang mementingkan kepentingannya sehingga menggunakan cara mudah dengan bekerja sama dengan negara yang memiliki kesamaan pemikiran sehingga terciptanya aliansi besar yang akhirnya membuat terbentuknya kebijakan berdasarkan *consensus* (Sabet, 2015). Hal ini dapat terjadi akibat aliansi yang besar sehingga mekanisme QMV tidak dapat terjadi karena tidak memenuhi persyaratan yaitu 55% negara anggota, merepresentasikan 65% total populasi dengan pilihan *vote in favour* (European Council and Council of the European Union, n.d.). Disebutkan juga oleh Navid Sabet bahwa alasan negara masuk ke dalam aliansi besar adalah ketakutan mereka pada dimarginalisasikan dan tidak dihiraukan pendapatnya oleh negara lain yang masuk ke dalam aliansi sehingga secara sukarela mereka beradaptasi dengan keadaan utamanya sikap dan pandangan negara di sekitar mereka. Berbagai faktor juga turut mempengaruhi pembentukan aliansi seperti kesamaan kepentingan maupun pandangan, latar belakang historis hingga kedekatan geografis (Doina, 2018).

1.4.1.4.1 *Qualified Majority Voting (Weighted Voting)*

Tabel 1.1 Alokasi *Weighted Voting* Negara Anggota UE

Negara	Alokasi Suara	Negara	Alokasi Suara
Belgia	12	Yunani	12
Bulgaria	10	Spanyol	27
Rep. Ceko	12	Prancis	29
Denmark	7	Italia	29
Germany	29	Siprus	4
Estonia	4	Latvia	4
Irlandia	7	Lithuania	7
Luksemburg	4	Romania	14
Hungaria	12	Slovenia	4
Malta	3	Slovakia	7
Belanda	13	Finlandia	7
Polandia	27	Swedia	10
Portugal	12	Britania Raya	29

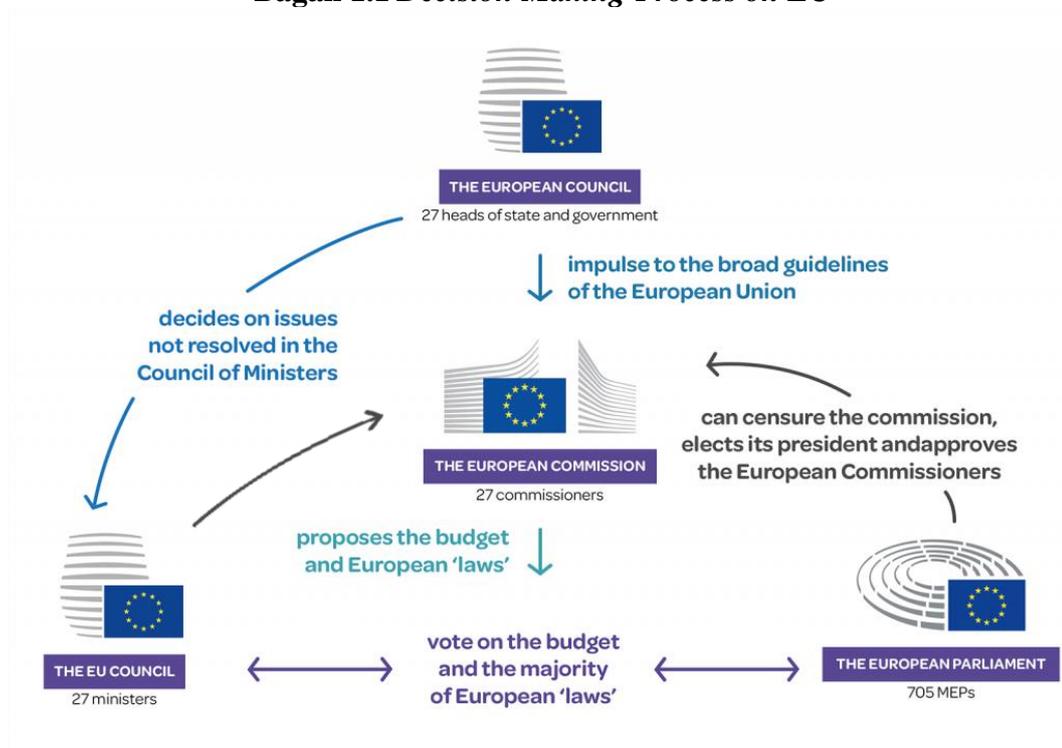
Sumber: Treaty of Lisbon, Official Journal of the European Union

Qualified Majority Voting/QMV berbasis *weighted voting* yang telah ditetapkan melalui perjanjian yaitu Treaty of Lisbon 2007, perjanjian ini menetapkan alokasi suara masing-masing negara dalam *weighted voting* (Sabet, 2015). *Weighted voting* dalam Uni Eropa didasarkan dari jumlah penduduk masing-masing negara anggota. Dalam praktiknya QMV merupakan sistem *decision-making* yang digunakan untuk mengambil kebijakan dalam UE tanpa

melalui persetujuan seluruh negara anggota atau *consensus-building decision-making* dengan syarat membutuhkan suara 55% negara anggota yang merepresentasikan 65% populasi UE (European Council and Council of the European Union, n.d.).

1.4.1.4.2 *Co-decision European Union*

Bagan 1.1 Decision Making-Process on EU



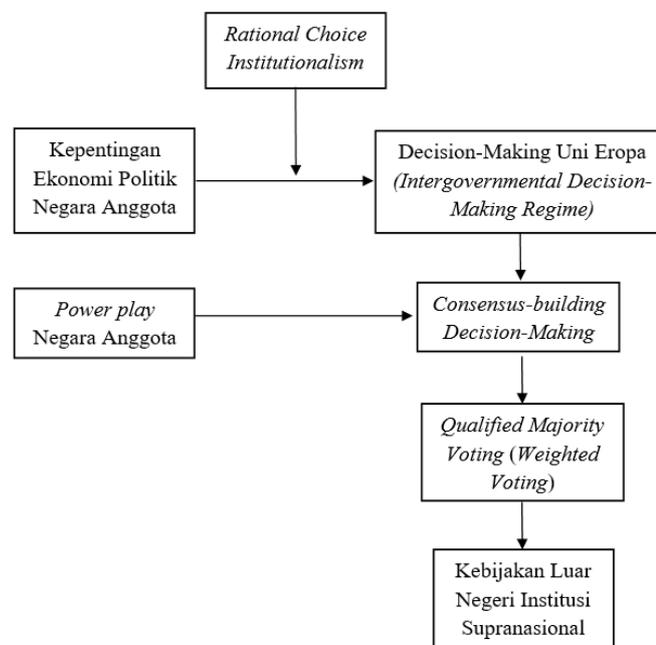
Sumber: Europe Direct (d'Azur, 2023)

Dikutip dalam laman resmi Uni Eropa, proses terbentuknya kebijakan strategis UE berawal dari pertemuan antar kepala negara dalam lembaga *European Council* yang kemudian menetapkan agenda strategis dan menjadi prioritas UE. Kemudian agenda strategis ini diadopsi oleh *European Commission* dan diimplementasikan ke dalam proposal kebijakan yang akan diajukan dan dibahas dengan lembaga institusi UE yang lain. Kemudian proposal kebijakan ini

menjalani serangkaian diskusi dengan *European Parliament* dan *Council of the European Union*. Kemudian jika *European Commission*, *European Parliament* dan *Council of the European Union* telah sepakat untuk mengadopsi proposal kebijakan, maka ketiga lembaga ini akan merilis *joint declaration* mengenai prioritas UE yang memberikan kejelasan dalam tindakan yang akan dilakukan serta memastikan fokus kepentingan politik terpenuhi (EU, n.d.).

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.2 Sintesa Pemikiran



Sumber: Penulis

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori yang telah disusun, sesuai dengan bagan di atas, maka terbentuklah sintesa pemikiran sebagai berikut. Untuk menjawab rumusan masalah mengenai alasan terbentuknya sebuah kebijakan luar negeri Uni Eropa, penulis menggunakan teori *rational choice institutionalism* yang merupakan hasil dorongan dari kepentingan ekonomi politik negara anggota yang kemudian terefleksikan dalam *decision-making* Uni Eropa

(*Liberal Intergovernmental Regime*). *Decision-making* Uni Eropa memberikan gambaran bagaimana kebijakan luar negeri dapat diusulkan kemudian dinegosiasikan. Proses pembentukan kebijakan ini melalui proses *consensus-building decision-making* dalam *European Council*. Dalam proses ini terdapat pembentukan aliansi yang berdasarkan alokasi suara dalam sistem *qualified majority voting (weighted voting)*. Kemudian kebijakan yang telah ditetapkan ditindaklanjuti oleh *European Commission* yang kemudian berlanjut didiskusikan dengan *Council of the European Union* dan *European Parliament*.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang masalah, kerangka teori dan konsep serta sintesa pemikiran yang telah dipaparkan oleh penulis dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian mengenai alasan Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific* tahun 2018-2021. Penulis berargumen bahwa alasan mengenai dikeluarkannya kebijakan strategi Uni Eropa untuk kawasan Indo-Pasifik dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi politik yang dimiliki oleh Prancis dan Jerman yang terefleksikan dalam proses *decision-making* dalam Uni Eropa. Pengaruh besar yang diberikan oleh Prancis dan Jerman yaitu telah mengeluarkan kebijakan strategi Indo-Pasifik versinya dengan berbagai latar belakang yang berbeda serta pendekatan yang berbeda pula. Selain itu Prancis dan Jerman mendorong secara aktif serta mengampanyekan dan membentuk aliansi agar UE membentuk kebijakan strategi untuk Indo-Pasifik sesuai dengan kepentingan ekonomi politik yang mereka miliki. Dengan alasan ini, kemudian Uni Eropa turut terdorong untuk melihat

Indo-Pasifik sebagai kawasan yang penting dan mereka harus mengakomodasi kepentingan Eropa secara keseluruhan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan topik yang dianalisis. Neuman (2017) menjelaskan bahwa metode deskriptif merupakan metode penelitian kedudukan sekelompok manusia, atau sebuah kondisi dan objek dalam studi kasus tertentu (Neuman, *Understanding Research*, 2017). Metode deskriptif ini digunakan dalam penelitian untuk meneliti dan menjelaskan mengenai bagaimana proses *decision-making* UE yang dipengaruhi kepentingan ekonomi politik Prancis dan Jerman sebagai alasan dibalik dikeluarkannya strategi kebijakan strategi Uni Eropa yang ditujukan untuk kawasan Indo-Pasifik

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dimulai dari tahun 2018 hingga 2021 dikarenakan pada 2018 Prancis sebagai negara anggota Uni Eropa mengeluarkan kebijakan strateginya untuk kawasan Indo-Pasifik. Kemudian berlanjut pada 2020, Jerman turut mengeluarkan kebijakan strategi untuk Indo-Pasifik versinya sendiri. Dan 2021 digunakan sebagai batas waktu pengumpulan sumber data karena Uni Eropa telah merilis kebijakan strateginya untuk kawasan Indo-Pasifik.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, terdapat 2 metode yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Menurut Neuman (2014), pengumpulan data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber orang pertama sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, studi pustaka, jurnal, laman resmi, dan artikel daring. Dalam penelitian ini kemudian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder karena data didapatkan dari penelitian terdahulu, jurnal, laporan, laman resmi, buku, dan artikel daring yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam usaha untuk menjelaskan topik yang diangkat. Menurut Lamont (2015) teknik analisis data kualitatif merupakan salah satu teknik analisis yang dijelaskan melalui kata dan kalimat dengan mengaitkan suatu peristiwa terhadap objek penelitian yang kemudian dapat menjelaskan secara sistematis dan akurat. Dengan teknik analisis data ini, penulis dapat menggunakannya untuk menemukan jawaban mengenai apa, mengapa, dan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi serta mencari tahu hubungan sebab akibat dan urutan peristiwa sesuai fakta yang ditemukan (Klotz, 2008).

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam kaidah penulisan penelitian ilmiah, untuk mempermudah pemahaman dari penelitian, studi penelitian akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab agar tersusun teratur dan sistematis, yang masing-masing sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang akan menjelaskan secara garis besar isi dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metodologi penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan mengenai dinamika pengambilan kebijakan luar negeri Uni Eropa. Dinamika ini merujuk pada kepentingan ekonomi politik yang dimiliki oleh Prancis dan Jerman kemudian kebijakan strategi yang sudah dikeluarkan oleh kedua negara yang kemudian melatarbelakangi kedua negara ini mendorong Uni Eropa untuk menciptakan kebijakan strategi Uni Eropa.

Bab III membahas mengenai bagaimana proses kebijakan strategi Uni Eropa yang ditujukan untuk kawasan Indo-Pasifik terbentuk beserta dengan dinamika pendorong terbentuknya kebijakan ini.

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.